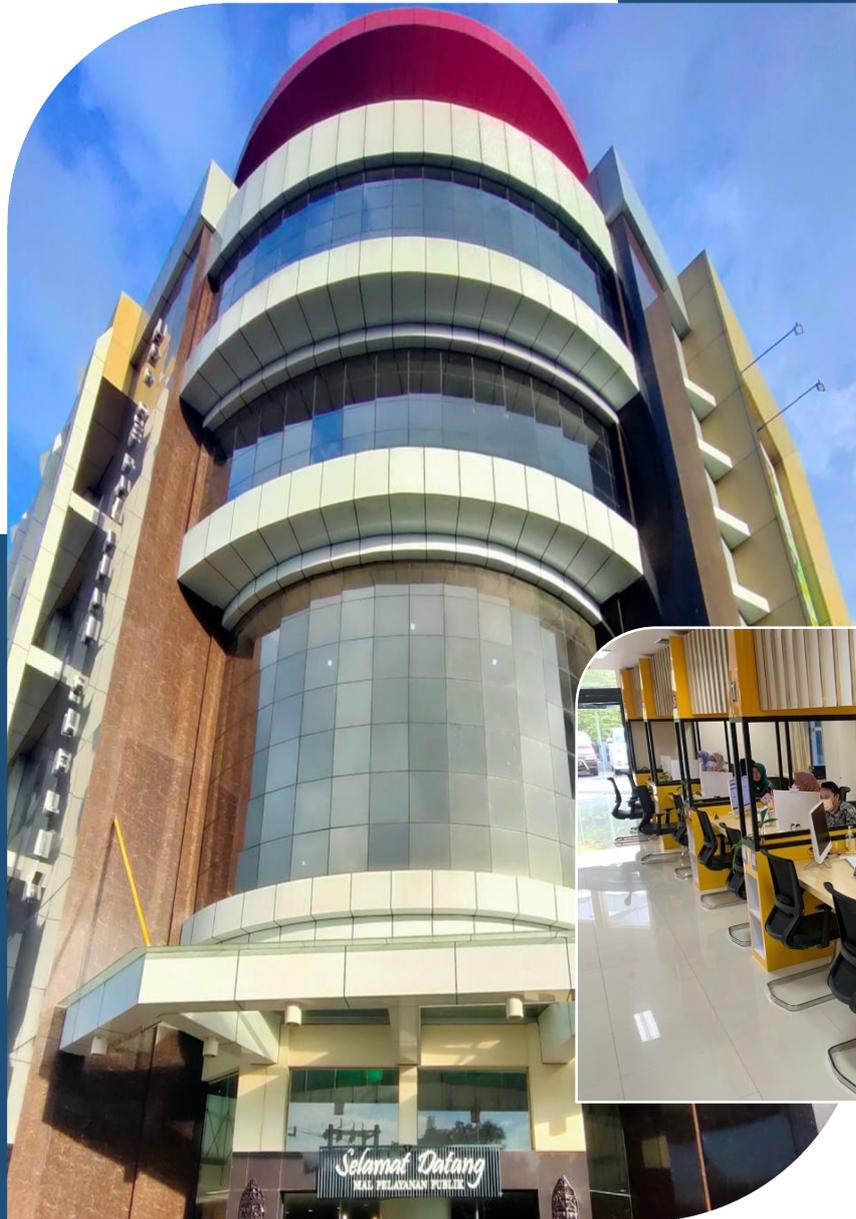




PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS
PENANAMAN
MODAL &
PELAYANAN
TERPADU
SATU
PINTU



LAPORAN KINERJA
DPMPTSP
TAHUN 2022

**Dinas Penanaman Modal &
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda**

Alamat : Jalan Pahlawan No.1 RT.34 Gedung MPP Samarinda 75123,
Telp. (0541) 739614, Fax (0541) 741286, SMS Center 082152246964

Email : dpmptsp.-smd@gmail.com,

Website : dpmptsp.samarindakota.go.id/mpp.samarindakota.go.id



RINGKASAN EKSEKUTIF



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam rentang waktu 5 (lima) Tahun. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kota Samarinda telah melaksanakan program dan kegiatan untuk

mencapai sasaran strategis tersebut melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. LKjIP tahun 2022 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan dalam Tapkin 2022 yang didasarkan pada Rencana Strategis 2021-2026. Pada tahun 2022 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran yakni meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2022 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk meningkatkan kinerja.

Secara umum DPMPTSP telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Publik. Pada tahun 2022 telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda,

sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan penanamn Modal dan pelayanan perizinan pada DPMPTSP.

Laporan Kinerja DPMPTSP merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan DPMPTSP dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya, serta pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2022 yang didasari oleh Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2021-2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda. Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja DPMPTSP yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun yang akan datang.

Dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja DPMPTSP secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa kinerja yang dicapai dari 6 (enam) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan, telah dilaksanakan dengan baik. Pada Tahun 2022 berdasarkan RENSTRA DPMPTSP ditetapkan 2 sasaran strategis dan indikator kinerja yang harus dicapai. Rata-rata capaian Kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 menunjukkan angka keberhasilan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pro-sentase	Tingkat Capaian Sasaran		
						B	C	K
1.	Meningkatnya Investasi	nilai investasi	Rp. 1.000.000.000.000,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN :Rp. 700.000.000.000,- PMA :Rp. 300.000.000.000,-	Rp.1.737.419.619.798,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN :Rp. 1.270.879.500.000,- PMA :Rp. 466.540.119.798,-	173,74 %	√		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	89,69 %	99,65%	√		

Dari table hasil pengukuran kinerja DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2022, secara umum menunjukkan hasil dengan katagori “BAIK”. dengan capaian rata-rata dari seluruh target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebesar 136 %.

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tidak lepas dari kerja keras semua Aparatur DPMPTSP Kota Samarinda, harmonisasi antar Bidang dan sinkronisasi fakta dan data. Guna menghadapi hambatan dalam pencapaian target indikator kinerja untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sesuai Rencana Strategi DPMPTSP, dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan sebagai berikut :

1. Strategi dan arah kebijakan Renstra disepakati oleh Perangkat Daerah untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
2. Total pagu perubahan Renstra harus sama dengan pagu Renstra sebelumnya walaupun ada perbedaan pagu Realisasi dengan pagu Renstra, maka harus disesuaikan.
3. Perangkat Daerah atau Bidang diperkenankan untuk menambah program baru dalam rangka menjalankan visi dan misi Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah diperkenankan mengubah atau mengganti program yang kurang memiliki tujuan atau goals ke program yang lebih tepat.
5. Sasaran adalah outcome atau benefit dari program atau kegiatan sub kegiatan.
6. Satu program bisa dilaksanakan lebih dari satu bidang dengan memperhatikan tujuan masing-masing serta berkaitan dengan tugas dan fungsi. Jika ada program yang dipegang lebih dari 1 Kepala Bidang, maka harus dicari indikator program yang bersesuaian.
7. Melakukan inovasi dan perbaikan dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda dan terus melanjutkan inovasi dan perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Samarinda sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026.
8. Melakukan kegiatan Konsultasi/Pendampingan kepada Investor untuk melaporkan kegiatan investasi.
9. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Bimbingan teknis perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
10. Membangun Kemitraan UMKM dengan Investor dengan melaksanakan Kegiatan temu usaha untuk meningkatkan Kemitraan Usaha UMKM dengan pelaku pasar serta melaksanakan Sosialisasi Kemitraan Usaha UMKM.
11. Perbaikan proses pelayanan perijinan agar pelayanan perijinan mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan, melalui penilaian-penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB, Ombudsman dan BKPM.

12. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan pelatihan penanganan pelayanan perizinan dengan diberlakukannya *Online Singe Submission (OSS) Publick Speeking, Exelent Service* kepada pegawai dilingkungan DPMPTSP Kota Samarinda.
13. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan up grade system aplikasi.
14. Perbaikan sistem pengendalian internal pelayanan perizinan, dengan melakukan penyempurnaan peraturan internal tentang SOP.

Secara keseluruhan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada tahun 2022 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada tahun 2022 dan seterusnya akan terus ditingkatkan Kinerja Pelayanannya.

Samarinda , Februari 2023
Kepala Dinas,

Jusmaramdhana Alus., SH., M.Si
NIP. 19711030 199403 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2022 telah selesai disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur serta melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut masih jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih rerorientasi pada hasil, relevan, efektif dan berkelanjutan dimasa yang akan datang.

Wassalamualikum Wr. Wb

Samarinda , Februari 2023
Kepala Dinas,

Jusmaramdhana Alus., SH., M.Si
NIP. 19711030 199403 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1. Umum	1
2. Maksud dan Tujuan	4
3. Ruang Lingkup	4
1.2.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5
1. Tugas Pokok	5
2. Fungsi	6
3. Tata Organisasi	7
4. Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana DPMPTSP	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1.Visi dan Misi.....	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
2.3 Perencanaan Keuangan	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1.Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Analisis Capaian Kinerja	16
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
2. Analisis Capaian Kinerja	22
3.2. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	22
1. Program Pengemabngan Iklim Investasi.....	20
2. Program Promosi Penanaman Modal.....	21
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	23
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	25

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	26
3.3. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan	28
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28
• Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Tahun 2022	28
• Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	31
3.4 Akuntabilitas Keuangan	32
3.5 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2022	35
3.5 Prestasi	37
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	38
4.2. Saran.....	39
 <u>LAMPIRAN :</u>	
1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022	
4. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 2022	
5. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 2022	
6. Rekapitulasi Laporan Bulanan Realisasi Anggaran Belanja Langsung APBD Tahun 2022	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP	8
3.1. DIAGRAM REALISASI ANGGARAN DENGAN EFISIENSI TAHUN 2022.....	37

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1.1. Jumlah personil DMPTSP	8
1.2. Jumlah personil berdasarkan Golongan.....	9
1.3. Jumlah personil berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon.....	7
Tabel 1.2. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan.....	8
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026	12
Tabel 2.2. PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2022	13
Tabel 2.3. Anggaranana Program dan Kegiatan Tahun 2022	13
Tabel 2.4. Belanja Pada DPMPTSP Tahun 2022	14
Tabel 2.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	14
Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan 2022	16
Tabel 3.2. Tabel Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Samarinda tahun anggaran 2021-2022	17
Tabel 3.3. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ...	18
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerka DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2022 dangan Target Jangka Menengah	18
Tabel 3.5. Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Jumlah nilai investasi	20
Tabel 3.6 Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Terlaksananya Event Promosi Investasi.....	21
Tabel 3.7. Perbandingan capaian kinerja Indikator kinerja Jumlah Penerbitan Izin Tahun 2022.....	23
Tabel 3.8 Perbandingan capaian kinerja Jumlah Permohonan Izin yang Terlayani melalui Aplikasi SIPO Tahun 2022	24
Tabel 3.9 Perbandingan capaian kinerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2022.....	26
Tabel.3.10 Perbandingan capaian kinerja pengembangan aplikasi IT DPMPTSP Samarinda.....	27
Tabel 3.11. Perbandingan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Tahun 2022	28
Tabel 3.12. Nilai Rata-rata (NRR) Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Berdasarkan 9 (sembilan) Unsur Pelayanan	29
Tabel 3.13 Perbandingan capaian kinerja penyusunan dokumen SAKIP DPMPTSP	31
Tabel 3.14 Program dan Kegiatan (Pagu APBDP) TAHUN 2022	32
Tabel 3.15 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN (Pagu APBDP) TAHUN 2022	35



I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan salah satu prioritas nasional berupa program reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan mindset dan culture set sehingga akan terwujud akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Tantangannya adalah membangun sistem akuntabilitas kinerja yang dapat terukur secara tepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan kebijakan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan telah menjadi isu pokok pembangunan nasional Indonesia. Membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik intinya adalah membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang mumpuni. Akuntabilitas juga merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik. Laporan kinerja merupakan Kegiatan pengukuran kinerja sudah lama secara rutin dilaksanakan di banyak pemerintahan atau organisasi publik lainnya. Namun masih menghadapi tantangan yang sama yaitu bagaimana mengembangkan sistem pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang lebih efisien dan efektif. Pelaporan informasi kinerja yang valid dan tepat waktu akan ikut menentukan bagaimana informasi kinerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pengelolaan pembangunan. Bertitik tolak pada hal-hal tersebut di atas, maka bagi instansi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja kendala-kendalanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwokarta dilaksanakan berdasarkan



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran 2022.

Pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah selalu berbasis pada prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol. Pencapaian optimal kegiatan merupakan cerminan keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga dapat mendukung keberhasilan Pemerintah Kota. Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal mana dimaksud telah ditetapkan didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda periode 2021-2026 merupakan acuan bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda periode 2021-2026 juga merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara internal baik itu unsur pimpinan maupun staf tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama. Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPMPTSP Kota Samarinda sebagai penyelenggara pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan serta koordinasi dengan instansi teknis. Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Dengan Tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal. Untuk mencapai fungsi maka Indikator Kinerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2022-2026 sebagai berikut :

1. Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN;
2. Jumlah nilai rata-rata Indeks Survei Kepuasan Masyarakat;

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DPMPTSP pada tahun anggaran 2022 mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 23.350.760.182,-** (dua puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah. Yang terbagi untuk belanja pegawai sebesar **Rp. 12.515.022.949,-** (dua belas milyar lima ratus lima belas juta dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah); Belanja Barang dan Jasa **Rp. 9.705.320.983,-** (sembilan milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan untuk belanja modal sebesar **Rp. 1.130.416.250,-** (satu milyar seratus tiga puluh juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah). Jumlah program dan kegiatan yang terealisasi dari anggaran tersebut yakni 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 24 (Dua puluh empat) sub kegiatan. Dari segi Penerimaan target retribusi yang ditetapkan sebesar **Rp. 13.500.000.000,-** (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) pada APBD Tahun 2022. total retribusi yang tercapai pada tahun 2022 sebesar **Rp. 1.627.162.888,-** (Satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) masih terdapat kekurangan **Rp. 11.872.837.112,-** (Sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah) dari Dari segi penerimaan masih terdapat kekurangan dari yang telah ditargetkkan pemerintah kota dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan pada masyarakat Kota Samarinda Pada tahun 2022 DPMPTSP terus mengoptimalkan inovasi Upaya yang dilakukan DPMPTSP dengan memberikan layanan tanpa tatap muka melalui Aplikasi SIPELATARAN (Sistem Pelayanan Langsung Tanpa Antrian), Whatsapp, (pendaftaran konsultasi dikomunikasikan melalui WA) sedangkan berkas persyaratan dikirimkan ke DPMPTSP atau melalui pendaftaran online di dpmptsp.samarindakota.go.id/portal.html.



2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran pencapaian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol dari kegiatan-kegiatan DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2022 dan penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima.

Sedangkan tujuannya untuk memperoleh umpan balik dari pengalaman pelaksanaan, pola pikir dan tindakan untuk upaya perbaikan terus menerus yang kesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja investasi penanaman modal, layanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk sesuai dengan per undang-undangan berlaku.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 ini mengenai kegiatan investasi penanaman modal dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kota Samarinda dengan urutan pembahasan adalah :

- a. Pendahuluan
- b. Perencanaan Kinerja
- c. Akuntabilitas Kinerja
- d. Penutup



1.2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda berasal penggabungan 2 (dua) instansi yaitu Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) yang kemudian di merger menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

1. TUGAS POKOK

Tugas Pokok DPMPTSP Kota Samarinda adalah membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal. Kewenangan atas dasar urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utamanya adalah peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah dengan sasaran pokok ialah menciptakan bangunan dasar bagi usaha Pelaksanaan Program Dan Rencana Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

DPMPTSP Kota Samarinda ditetapkan menjadi lembaga difinitif ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 pada Tanggal 16 Agustus 2016 dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda



Tahun 2016 Nomor 3).

Kemudian diterbitkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Tujuan dibentuknya DPMPTSP Kota Samarinda adalah menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan bidang investasi dengan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. percepatan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan. dengan sasaran Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

DPMPTSP Kota Samarinda pada saat ini berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 1 RT. 34 Gedung MPP Samarinda 75123, Telp. (0541) 739614, Fax (0541) 741286, SMS Center 082152246964 Email : dpmptsp.smd@gmail.com, Website : dpmptsp.samarindakota.go.id/ mpp.samarindakota.go.id.

TUGAS POKOK DPMPTSP Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

2. FUNGSI

DPMPTSP Kota Samarinda memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas.
2. Perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan Program kerja Tahunan Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana strategis, tujuan dan sasaran serta kerjasama, baik dalam negeri maupun luar negeri Bidang Penanaman Modal.
5. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas tertentu penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



7. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.
8. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Walikota.
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

3. TATA ORGANISASI

a. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, ditetapkan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021, yaitu :

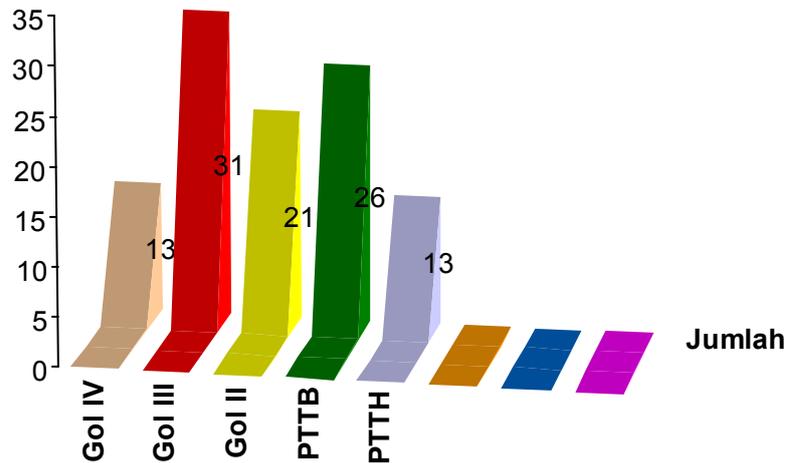
1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Staf
3. Bidang Investasi, membawahi :
 - Staf
4. Bidang Pengolahan Data Informasi, membawahi :
 - Staf
5. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - Staf
6. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi :
 - Staf
7. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahi :
 - Staf
8. Kelompok Jabatan Fungsional;



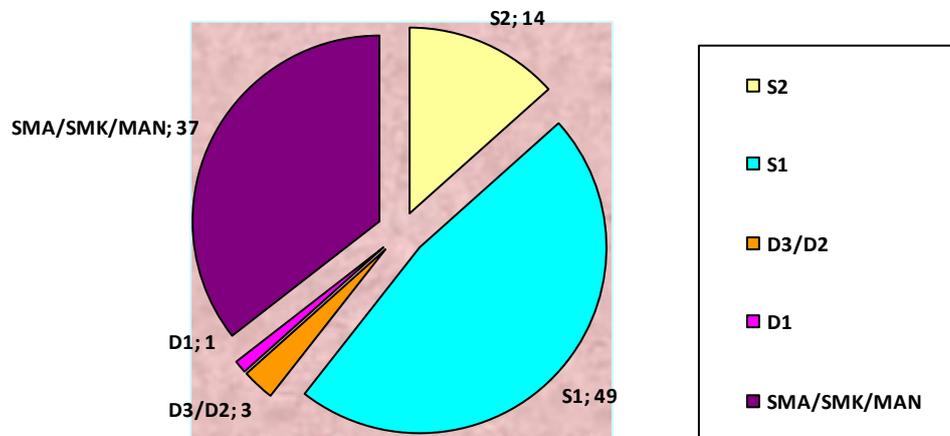
Tabel 1.1
Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon

No.	Eselon / Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II b	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Eselon III a	Sekretaris	1 Orang
3.	Eselon III b	Kepala Bidang	5 Orang
4.	Eselon IV a	Kasubbag Umum	1 Orang
5.	Fungsional	Jabatan Fungsional	15 Orang
6.	Non Eselon	Staf	42 Orang
7.	PTTB	Staf	26 Orang
8.	PTTH	Staf	13 Orang
Jumlah Keseluruhan			104 Orang

Grafik 1.2
Jumlah personil Berdasarkan Golongan



Grafik 1.3
Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan





b. Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Air Conditioner	Unit	10
2	Mesin Penghacur Kertas	Unit	2
2	Alat peraga (Neon Box & Pigura)	Unit	11
3	Alat Ukur	Unit	19
4	Audio visual Logitech	Unit	1
5	Bagunan Gedung Kantor	Unit	2
6	Board Display	Unit	4
7	Brankas	Unit	5
8	Camera video, digital, film	Unit	5
9	Caption Generator	unit	1
10	Computer Compatible	Unit	27
11	CPU	Unit	29
12	Facsimile	Unit	1
13	Kursi kerja	Unit	129
14	Meja kerja	Unit	106
15	Laptop	Unit	21
16	LCD Projector/Infocus	Unit	1
17	Lemari besi dan Kayu	Unit	100
18	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	21
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	128
20	Mesin Absensi	Unit	1
21	Mesin Fotocopy Folio Canon / iR 2420L	Unit	1
22	Monitor	Unit	10
23	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	18
24	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	4
25	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	5
26	ServerASUS / RS520-E9/RS8	Unit	1
27	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi)	Unit	1
28	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	46
29	Router (MIKROTIK / ROUTERBOARD)	Unit	3

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Samarinda, sudah memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Publik untuk pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.



II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah Terpilih dalam Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 adalah :

“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN ”

Dalam mencapai Visi ini, ada 6 (enam) Misi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

1. Mewujudkan masyarakat madani (civil society) ditopong dengan sumberdaya manusia unggul, sehat jasmani dan rohani dalam kehidupan yang harmonis, egaliter serta relasi yang seimbang antar tiga pilar (masyarakat, negara dan swasta).
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan PAD, berkurangnya angka pengangguran, berkembangnya sector riil diluar pertambangan, munculnya ekonomi kreatif, start up dan market place di era revolusi industry 4.0.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam



proses perumusan dan pengawasan kebijakan.

4. Mewujudkan masyarakat religius, mengedepankan nilai-nilai agama dan memegang teguh tradisi dan adat istiadat sebagai warisan leluhur dan identitas bangsa.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, modern, nyaman dan ramah lingkungan dalam konsep SMART CITY yang dicirikan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun yang menjadi fokus DPMPTSP Kota Samarinda adalah misi ke-2 dan misi ke-3. yang menjadi tugas dan tanggungjawab DPMPTSP dalam pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode Tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dikelompokkan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Iklim Investasi di Kota Samarinda;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan. Sedangkan

Sasaran dari Tujuan Jangka Menengah yaitu :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi;
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan;

Tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Sasaran				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Iklim Investasi di Kota Samarinda	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	950 Milyar (Rp)	1 Triliun (Rp)	1,1 Triliun (Rp)	1,2 Triliun (Rp)	1,3 Triliun (Rp)	1,4 Triliun (Rp)
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Rata-Rata Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	89	90	91	92	93	94



2.2. PERJANJIAN KINERJA 2022

Adapun Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dan tercapai optimal pada tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA DPMPSTP TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi	Rp. 1.000.000.000.000,-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90

Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3
ANGGARAN DAN PROGRAM DPMPSTP TAHUN 2022

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 64.990.000,00
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 451.289.000,00
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 172.992.900,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 422.454.500,00 (APBD :Rp.14.841.500,- DAK : Rp.407.613.000,-)
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 507.756.500,00
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.731.277.282,00
Total Jumlah Anggaran		Rp. 23.350.760.182,00

2.3. PERENCANAAN KEUANGAN

Dalam satu tahun anggaran, seluruh Perangkat Daerah diberikan kesempatan untuk merencanakan pagu anggaran yang sudah ditetapkan melalui anggaran perubahan. Berikut uraian anggaran perubahan berdasarkan DPA DPMPSTP Tahun 2022 yang tertuang dalam program dan kegiatan sebagaimana terurai dalam tabel berikut :



Tabel 2.4
Belanja Pada DPMPTSP (Pagu APBDP) TAHUN 2022

NO	URAIAN	PAGU (Rp)
I	Belanja Operasional	
	1. Belanja Pegawai	12.515.022.949,-
	2. Belanja Barang dan Jasa.	9.705.320.983,-
2	Belanja Modal	
	3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.	738.964.000,-
	4. Belanja Modal jalan,Jaringan dan Irigasi	356.452.250,-
	5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.	35.000.000,-
	TOTAL	23.350.760.182,-

Tabel 2.5
PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN (Pagu APBDP) TAHUN 2022

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.720.000,-
	2. Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.410.000,-
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.301.410.949,-
	4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-
		1.237.127.000,-
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.686.000,-
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	873.000.000,-
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183.750.000,-
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	311.250.000,-
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.600.000,-
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.972.000,-
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.139.571.333,-
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleengkapan Kantor	80.000.000,-
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.763.423.000,-
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	288.480.300,- 166.707.300,- 217.390.000,- 2.810.779.400,-
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
6	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	64.990.000,-
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
7	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	65.145.000,- 386.144.000,-
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
8	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	172.992.900,-
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
9	Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	14.841.500,- 272.450.500,- 135.162.500,-
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
10	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan : 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	507.756.500,-
	TOTAL	23.350.760.182,-



III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Pencapaian kinerja yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Samarinda melalui 6 (enam) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :

- 81 - 100 = Baik
- 50 – 80 = Cukup
- Dibawah 50 = Kurang

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan oleh organisasi untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. DPMPTSP Kota Samarinda menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Samarinda. Dari hasil pengukuran kinerja, sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja persentase yang telah dicapai sebesar lebih dari 100% dan 1 (satu) Indikator Kinerja kedua telah tercapai target 99%. hasil pengukuran kinerja pencapaian DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2022 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pro-sentase	Tingkat Capaian Sasaran		
						B	C	K
1.	Meningkatnya Investasi	nilai investasi	Rp. 1.000.000.000.000,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN :Rp. 700.000.000.000,- PMA :Rp. 300.000.000.000,-	Rp.1.737.419.619.798,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN :Rp. 1.270.879.500.000,- PMA :Rp. 466.540.119.798,-	173,74 %	√		



2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	89,69	99,65%	√		
----	---	----------------------------	----	-------	--------	---	--	--

Dari hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Tahun 2022, berdasarkan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2022 dimana dilihat dari tabel menunjukkan hasil dengan kategori “BAIK”.

Pada tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dari 2 indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja (173%) tercapai dan 1 (satu) Indikator Kinerja tercapai target (99,65 %).

Tabel 3.2
Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021 – 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	nilai investasi : - Jumlah nilai investasi	Rp.950.000.000.000,-	Rp. 835.558.300.000	Rp.1.000.000.000.000,-	Rp.1.737.419.619.798,-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	88,7	90	89,69

Pada tahun sebelumnya (2021), capaian kinerja jumlah investasi sebesar 87,95 % terdapat kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya, dimana dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat sudah mulai stabil, banyak perusahaan yang sudah beroperasi lagi dan mulai melaporkan kegiatan penanaman modalnya. Selain itu sehubungan dengan adanya penetapan dari pemerintah pusat wilayah Kalimantan Timur khususnya Penajam Paser Utara sebagai Wilayah Ibu Kota Negara menjadikan samarinda menjadi salah satu kota penyokong pembangunan IKN. Sebagai kota penyokong IKN ini membuat kota samarinda terus berbenah sehingga banyak potensi investasi yang ditawarkan menarik minat bagi investor baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri untuk berinvestasi dikota samarinda.



Pada tahun 2022 DPMPTSP dari target realisasi investasi yang ditetapkan sebesar DPMPTSP dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 173,74 % dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.737.419.619.798,-. dan untuk capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah tercapai sebesar 89,69%, pencapaian tahun 2022 tercapai dengan sangat baik. Sehingga Dapat disimpulkan bahwa pencapaian tahun 2022 lebih baik dibandingkan pencapaian tahun 2021 dan bahkan nilai realisasi melebihi dari target investasi yang ditetapkan, Pencapaian tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh aparatur di DPMPTSP kota samarinda melalui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Pengembangan sistem perizinan berusaha (OSS), penambahan sarana dan prasarana pelayanan perizinan, perbaikan kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing investasi, meningkat kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal, serta optimalisasi pelaksanaan pameran untuk menarik minat investor berinvestasi di Kota Samarinda.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Berikut diuraikan secara keseluruhan hasil pengukuran pencapaian Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2022.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	950 M	1 T	1,1 T	1,2 T	1,3 T	1,4 T	1,4 T
2	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	88 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %

Tabel 3.4
perbandingan realisasi kinerja DPMPTSP
Kota Samarinda Tahun 2022 dengan target jangka menengah

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu	Target dan Realisasi Tahun 2022		Pro-sentase
				Target	Realisasi	
1.	Nilai Investasi	Rp.6.000.000.000.000,-	Rp. 835.558.300.000,-	Rp.1.000.000.000.000,-	Rp.1.737.419.619.798,-	42,9 %



2.	Jumlah Perda	1 Perda	1 dokumen naskah akademis	1 Dokumen	-	-
3.	Jumlah Investor	31 Investor	-	-	-	-
4.	Jumlah promosi yang diselenggarakan	25 Event	4 Event	3 (ada penyesuaian target Kinerja)	3	28 %
5.	Jumlah dokumen strategi promosi	5 Dokumen	-	-	-	-
6.	Jumlah izin terbit efektif	15.750 izin	-	2.550	17.595	111,7 %
7.	Jumlah izin terbit	21.750 izin	4.918 Izin	3.550	19.888	91,4 %
8.	Jumlah LKPM yang Masuk	1500 laporan	-	300 laporan	300 Laporan	20 %
9.	Jumlah Laporan Pengendalian	200 Laporan	-	200 Laporan	353 Laporan	176,5 %
10.	Jumlah Pengguna Layanan Data	24.500	-	4.000	40.939	167 %
11.	Jumlah Sistem Aplikasi	14 Aplikasi	11 Aplikasi	1 Aplikasi	13 Aplikasi	92,8 %
12.	Jumlah Database yang diarsipkan	24.000	-	4.000	20.795	86,6 %
13.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	94	-	90	89,69	95,4 %
14.	Nilai AKIP	85	78,33	81	-	92,1 %

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Hingga akhir tahun 2022, DPMPTSP Kota Samarinda telah melaksanakan Program/Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya yang telah dituangkan pada perjanjian kinerja tahun 2022 dengan baik. Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Adapun seluruh capai indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagai berikut :



STRATEGIS I : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja tersebut sudah mencapai (173,74 %)



Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) “**Meningkatkan Pertumbuhan Investasi**” diukur dengan menggunakan satu Indikator Kinerja yaitu peningkatan Nilai Investasi setiap tahun. Isu isu strategis Penanaman Modal :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing Kota Samarinda
2. Tersedianya rumusan kebijakan penanaman modal yang mendukung iklim investasi Kota Samarinda sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan penanaman modal yang diarahkan pada peningkatan daya saing kota.
3. Meningkatkan citra Kota Samarinda sebagai Kota tujuan penanaman modal yang prospektif dan kondusif dan menjanjikan bagi para investor baik dalam maupun luar negeri.
4. Meningkatkan kerjasama penanaman modal pemerintah dengan UMKM sebagai percepatan investasi di Kota Samarinda.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan pelayanan yang berdampak pada kondusifnya iklim investasi di Kota Samarinda.

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI

Indikator Jumlah nilai investasi.

Pencapaian indikator kinerja ini di ukur dari nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kota Samarinda berdasarkan data Ijin Prinsip Penanaman Modal.

Tabel 3.5
Perbandingan capaian kinerja Indikator Kinerja Jumlah Nilai Investasi

No.	Indikator Kinerja	2022		
		Target	Realisasi	Pro-sentase
1.	Nilai investasi : - Jumlah nilai investasi	Rp.1.000.000.000.000,-	Rp.1.737.419.619.798,-	173,74 %
2.	Dokumen Naskah Akademis	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Kategori “BAIK”				

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut:
Capaian Indikator kinerja jumlah nilai investasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.737.419.619.798,- Tercapai 173,74 % dari target yang telah ditetapkan, secara keseluruhan dari 2 indikator kinerja ini capaian telah **BAIK**. pencapaian indikator ini



melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp.64.990.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.59.245.550,-. Persentase realisasi 91,16%.

Penanaman modal dibagi dua yaitu, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja ini adalah :

1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis mengenai perijinan berusaha berbasis resiko yang rutin dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda kepada pelaku usaha yang berinvestasi di Kota Samarinda.
2. Hadirnya klinik Investasi sebagai wadah konsultasi langsung/pendampingan antara aparatur/SDM dengan para pelaku usaha/investor yang masih belum memahami mengenai tata cara pengisian LKPM.
3. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah terkait dengan upaya Harmonisasi Investasi Kajian Calon Investor pada DPMPTSP.

Adapun Masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi investasi pada tahun 2022 yakni :

1. Masih banyaknya LKPM yang disampaikan pelaku usaha tidak disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
2. Kurang tegasnya sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM nya secara berkala.

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kegiatan pameran dan non pameran dalam dan luar kota wilayah kalimantan timur.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan kota samarinda sebagai kota tujuan investasi agar nilai investasi di kota samarinda terus meningkat. Berikut laporan kegiatan pelaksanaan pameran yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2022 :

Tabel 3.6

Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Terlaksananya Event Promosi Investasi.

NO.	INDIKATOR KINERJA	2022		
		TARGET	REALISASI	%
1.	Terlaksananya Event Promosi Investasi	3 Event	3 Event (Pameran 2 Temu Usaha 1)	100 %
Kategori "BAIK"				



- Analisis pencapaian target dengan terlaksananya kegiatan promosi pameran yang terus dilaksanakan dalam upaya mempromosikan dan memperkenalkan produk unggulan daerah Samarinda. Pencapaian indikator ini melalui Program Promosi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 451.289.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 397.584.400,- Persentase realisasi 88,09 %. Realisasi target yang dapat dicapai dari anggaran yang diserap sebanyak 100% dengan mengikuti 2 event di beberapa wilayah dalam dan luar wilayah Kalimantan Timur. Pelaksanaan kegiatan pameran yang dapat dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pameran dalam wilayah Kalimantan Timur dengan anggaran sebesar Rp.386.144.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.332.957.600,- persentase realisasi 86,23 %. dalam rangka menampilkan informasi hasil-hasil pembangunan fisik dan non fisik, mempromosikan dan memperkenalkan produk unggulan daerah dan produk kreatif serta menyebarkan informasi potensi daerah dalam hal investasi, pariwisata dan perdagangan.
- Analisis pencapaian target non pameran dengan anggaran sebesar Rp. 65.145.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 64.626.800,- persentase realisasi 99,20%. Realisasi target telah tercapai dengan maksimal sebanyak 100 %. Kegiatan kerjasama non pameran yang dilaksanakan ini berhasil memberikan fasilitas kemudahan berusaha dalam bentuk Pelayanan Perizinan dan Klinik Investasi, Memberikan ruang atau tempat dalam kegiatan event temu usaha untuk UMKM pelaku usaha besar dan para investor dalam rangka promosi investasi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja adalah :

1. Mengusulkan anggaran kepada Tim Penganggaran Daerah
2. Melakukan Promosi secara gencar dan lebih intens
3. Memberikan bimbingan dan arahan kepada penjaga stand pameran
4. Memberikan kemudahan layanan Berbantu Perizinan Berusaha
5. Berkoordinasi dengan OPD /Perangkat Daerah, Lembaga dan Pelaku Usaha terkait data peluang dan Potensi Investasi guna menyusun bahan Promosi penanaman Modal.
6. Memberikan fasilitas atau ruang untuk Klinik Investasi
7. Menjembatani pelaku usaha UMKM untuk bermitra dengan perusahaan besar



Selain upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja juga terdapat masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu :

1. Keterbatasan Anggaran/ Dana
2. Kurangnya promosi mengenai wisata daerah
3. Belum optimalnya sarana promosi investasi
4. Belum optimalnya penyajian dan pengembangan potensi investasi untuk dapat dipromosikan.

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Jumlah Penerbitan Izin dalam rangka Peningkatan Investasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 yang masih masuk dalam izin pendelegasian PTSP telah dilaksanakan dengan baik. Pencapaian indikator kinerja berdasarkan prosentase dokumen data perizinan yang dapat dilaksanakan adalah 100% dari yang telah ditargetkan.

Tabel 3.7
Perbandingan capaian kinerja Indikator kinerja Jumlah Penerbitan Izin

No.	Indikator Kinerja	Capaian			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Jumlah Izin yang Terbit Efektif	-	-	2.550	17.595
2.	Jumlah Izin Terbit	7.500	4.918	3.550	19.888
3.	Jumlah Masyarakat Pelaku Usaha	-	-	5.100	15.244
4.	Jumlah Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti	-	-	40	81
		KATEGORI” BAIK”			

Analisis pencapaian target kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 172.992.900,- yang terserap Rp. 165.780.145,- persentase realisasi 95,83 % dari anggaran yang terserap, realisasi target telah tercapai 100 % dengan Kategori **Baik**.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah :



1. Penerbitan Perijinan Berusaha dan PBUMKU melalui oss.go.id dengan dilakukannya pembinaan terhadap pendamping pelayanan perijinan baik di FO MPP dan Operator Kecamatan.
2. Berkoordinasi dengan Bidang IT Untuk Pelayanan Non Perijinan melalui DIPO dan OPD Teknis yang memiliki hak akses turunan OSS untuk verifikasi perijinan berusaha.
3. Melakukan Sosialisasi terus menerus baik lewat media sosial, media massa dan OPD Teknis kepada masyarakat.
4. Terus melakukan koordinasi dengan 10 kecamatan melalui group whatsapp dan melakukan layanan perbantuan dan konsultasi.
5. Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap operator kecamatan
6. Melakukan pembinaan dan layanan konsultasi untuk tiap OPD teknis yang melakukan verifikasi.

DPMPTSP terus mengembangkan inovasi Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO) yang merupakan Layanan Pendaftaran Izin Secara Online Dan Tracking Izin Untuk Melihat Proses Izin yang dapat diakses langsung oleh pemohon melalui website DMPTSP. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan layanan dan memudahkan pemohon yang akan mengurus perizinan usahanya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan pada tahun 2022 antara lain , Kecepatan akses internet yang tidak stabil sehingga menyulitkan untuk proses perijinan secara online.

Rincian permohonan izin terbit yang dapat diproses oleh DPMPTSP pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Jumlah Permohonan Izin yang Terlayani
Melalui Aplikasi SIPO Tahun 2022

No.	NAMA IZIN	Jumlah Izin Terbit	Ket
1.	Penerbitan SIPP	756	
2.	SIPA Pelayanan	193	
3.	SIPA Cabut	103	
4.	SIPA Ahli Labolatorium	163	
5.	SIPA Distributor	19	
6.	SIPA Bidan	275	
7.	SIPA Bidan Mandiri	28	
8.	SIPPA (Izin Anastesi)	8	
9.	SIP-E (Izin Praktik Elegtromagnetis)	5	
10.	SIPF (Fisioterapi)	20	



11.	SIPF Mandiri(Fisioterapi Mandiri)	5	
12.	SIPTTK (Izin Kefarmasian)	251	
13.	SIPOT (Izin Okupasi Terapis)	4	
14.	SIPRad (Izin Radiografer)	37	
15.	SIK PM (Izin Perekam Medis)	30	
16.	SIPRO (Izin Praktek Refleksionis dan Optimetris)	14	
17.	SIP-Gz (Izin Tenaga Gizi)	28	
18.	SIPTGM (Izin Terapis Gizi dan Mulut)	18	
19.	SIPTW (Izin Terapis Wicara)	6	
20.	SIPPK (Izin Psikologi Klinis)	6	
21.	SIKTS (Izin Tenaga Sanitarian)	25	
22.	Penyehat Tradisional	9	
23.	Izin Apotik	30	
24.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	1	
25.	Izin Operasional Alat Kesehatan	3	
26.	Izin Operasional Klinik	15	
27.	Izin Operasional Rumah Sakit		
28.	Izin Pelayanan Hemodialisis	1	
29.	Izin Penyelenggaraan Lab.Pratama		
30.	Izin Toko Obat	4	
31.	Izin Optik	1	
32.	Pest Control	1	
33.	SLS DAM (Sertifikat Kaik Sehat Depot Air Minum)	9	
34.	SLS IRT	76	
35.	SLS PIRT/SPPIRT	73	
36.	SLS Resto	13	
37.	Laik Sehat Hotel	4	
38.	Mikol	4	
39.	Reklame Tetap	19	
40.	Sosial	5	
41.	Pengumpul Uang	3	
42.	Pendidikan (PAUD)	9	
43.	Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	15	
TOTAL		2.289	

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Iklim penanaman modal yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha untuk melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal secara berkala terus di upayakan oleh DPMPSTSP untuk meningkatkan laporan realisasi investasi.



Tabel 3.9
Perbandingan capaian kinerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No.	Indikator Kinerja	Capaian			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Jumlah Laporan Pengendalian	100 %	100 %	200 laporan	353 Laporan
2.	Jumlah LKPM yang masuk	-	-	300 LKPM	300 LKPM
	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	-	-	200 Kegiatan Usaha	45
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	-	-	30 Pelaku Usaha	300
	Jumlah kegiatan usaha dari pealku usaha yang melakukan korodinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	-	-	50 Kegiatan Usaha	353
		KATEGORI” BAIK”			

Analisis pencapaian target kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan sebesar Rp. 422.454.500,- yang terserap Rp. 393.524.500,- persentase realisasi 92,49 % dari anggaran yang terserap, realisasi target telah tercapai dengan maksimal sebanyak 100 % dengan melaksanakan Kegiatan-kegiatan pada tahun 2022 antara lain :

- Mengunjungi langsung pelaku usaha mengenai laporan dan pengawasan LKPM.
- Kegiatan pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis LKPM Online, sosialisasi dan bimbingan teknis OSS RBA, sosialisasi kemitraan Usaha tentang tata cara pengisian LKPM online.
- Meningkatkan koordinasi dengan OPD Teknis terkait pengaduan yang diajukan

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ini antara lain , anggaran yang diberikan tidak mencukupi untuk merealisasikan kegiatan.

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pengolahan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang



terintegrasi.

Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. Pencapaian kinerja pelayanan saat ini sangat bergantung pada penerapan Sistem Aplikasi IT DPMPTSP yang terus dikembangkan sebagaimana terinci pada table di bawah ini :

Tabel. 3.10
Perbandingan capaian kinerja pengembangan aplikasi IT
DPMPTSP Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja	Capaian			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Jumlah Pengguna Layanan Data	-	-	4.000	40.939
2.	Jumlah Sistem Aplikasi	10	11	1	1
3.	Jumlah Data Base	5.000	5.000	4.000	20.796
Kategori “BAIK”					

Analisis pencapaian target kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 507.756.500,- yang terserap Rp. 496.238.850,- persentase realisasi 97,73%. dari anggaran yang terserap, realisasi target telah tercapai dengan maksimal sebanyak 100 % dengan melaksanakan Kegiatan-kegiatan pada tahun 2022 antara lain :

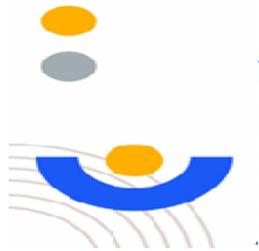
1. Secara rutin melakukan dilakukan pemeliharaan IT memastikan bahwa semuanya terus berjalan dengan lancar dan efisien untuk mempertahankan sistem dan menjaga sistem, peralatan yang digunakan, aplikasi, jaringan, database, dll. Dalam kondisi baik.
2. Melaksanakan pengarsipan digital melalui aplikasi smart card.
3. Data dan informasi perizinan yang tersaji cepat dan akurat selalu di update melalui website (dpmptsp.samarindakota.go.id) dan Media Sosial seperti Facebook (FB: DpmptspSamarinda) dan Instagram (Dpmptsp Kota Samarinda) agar masyarakat mudah untuk mengakses data dan informasi tentang pelayanan perizinan dan informasi lainnya.

Adapun kendala-kendala dalam penerapan integrasi aplikasi SIPO dan KSWPD ini



yakni :

1. Kendala bandwidth yang ada di DPMPTSP
2. Tidak semua perangkat di DPMPTSP bisa mendukung akibat faktor usia alat.



STRATEGIS II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

Januari 2022



Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja tersebut sebesar 99,65 %

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan berikut ini:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Tahun 2022.

Pencapaian indikator kinerja ini diukur dari Survey Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan di DPMPTSP yang dilakukan setiap tahunnya.

Tabel 3.11
Perbandingan capaian kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan

No.	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		%
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Tahun 2022	92	88,7	90	89,69	99,65 %
						Kategori "BAIK"

Analisis dan evaluasi terhadap keberhasilan atas pencapaian target ini dilakukan dengan melakukan Penyusunan Laporan SKM dan melakukan perbaikan kinerja pelayanan terutama pada unsur pelayanan dengan nilai terendah. Adapun langkah – langkah penyusunan Laporan SKM pada DPMPTSP Kota Samarinda dengan tahapan sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu



dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

2. Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diterima untuk Seluruh layanan Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan, maupun layanan berbantuan OSS yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dan telah dicapai 231 responden maka dapat dilakukan perhitungan. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap jenis pelayanan yang telah mencapai 231 responden maka diperoleh hasil skor rata-rata Indeks **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): 89,69**. Dengan mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31 - 100.
3. Untuk nilai rata-rata setiap unsur pelayanan dari seluruh jenis pelayanan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022, dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

Nilai Rata-rata (NRR) Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	RATA-RATA
1.	Persyaratan	3.500
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.553
3.	Waktu Penyelesaian	3.421
4.	Biaya/Tarif	3.947
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.408
6.	Kompetensi Pelaksana	3.526
7.	Perilaku Pelaksana	3.513
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.684
9.	Sarana dan Prasarana	3.882

4. Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 3,250 atau BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang



perlu ditingkatkan kembali.

5. Dari Tabel dapat dilihat bahwa kesemua unsur pelayanan memiliki Nilai (NRR) yang BAIK dengan nilai (NRR) tertinggi adalah Unsur biaya/tarif (NRR 3,947), Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi berdasarkan penilaian responden adalah unsur Biaya/Tarif. Nilai Rata-Rata kesemua unsur lebih dari 3,250, hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda umumnya sudah baik dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, walaupun nilai rata-rata semua unsur menunjukkan kinerja pelayanan yang baik. Selain itu untuk unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap ditingkatkan. Dan 9 (sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat diatas 3,260 mutu pelayanan A (sangat Baik).

6. Beberapa unsur kualitas pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan yakni :
 - a) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (NRR 3.408)
 - b) Waktu Penyelesaian (NRR 3.421)

Berdasarkan hasil Indeks SKM yang telah dilakukan secara terus menerus maka dipandang perlu untuk mengadakan beberapa upaya perbaikan kinerja pelayanan Perizinan dan non Perizinan, Penanaman Modal, dan layanan berbantuan OSS khususnya kepada Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, serta Produk Waktu Penyelesaian, karena pada awal hingga akhir tahun 2022 ini masih terhambat oleh situasi pasca pandemi virus COVID-19 yang membatasi pelayanan tatap muka, dan menggunakan Sistem Online yang membuat masyarakat atau pengguna layanan kebingungan dengan Persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur serta waktu penyelesaian yang disesuaikan dengan situasi yang mendukung protokol kesehatan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan prima dalam rangka mewujudkan DPMPSTP Kota Samarinda sebagai wilayah “birokrat yang bersih dan melayani”.

Hal ini agar dapat mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan yang berorientasi



untuk meningkatkan minat dan realisasi Investasi Dunia Usaha pada pembangunan Kota Samarinda menuju Kota Pusat Peradaban dengan percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai ketentuan yang berlakudebgan prima sesuai yang diharapkan berujung pada capaian Akuntabilitas Pelayanan Publik yang mencakup biaya,waktu,proses dan produk.

2. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dari seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan DPMPTSP yang menjadi urusan dan tanggungjawab secara keseluruhan telah dilaksanakan. Penyusunan seluruh capaian kinerja DPMPTSP sebagaimana tergambar dalam table berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan capaian kinerja penyusunan dokumen SAKIP DPMPTSP

No.	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	PERSEN-TASE
1.	Nilai Evaluasi AKIP	80	78,33	81	-	-
2.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
3.	Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4.	Tersedianya Dokumen Pembangunan Zona Integritas	-	-	Nilai 85	44,88 (Nilai Komponen Pengungkit Evaluasi ZI)	52,8 %
5.	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pegawai	-	-	SIMPEG	SIMPEG Sudah dilaksanakan	100 %
6.	Tersusunnya Dokumen Akuntabilitas Kinerja	-	-	1 Dokumen Kinerja	6 Dokumen SAKIP tahun 2022 (PK, IKU, RENAKSI, RENJA, RKT, RKA/DPA)	100 %
Kategori “BAIK”						

Pencapaian target ini Dengan tersusunnya seluruh dokumen SAKIP yakni Renstra, Renja, PK IKU, Pengukuran kinerja, RKT, LAKIP,LKPJ,LPPD dan EKPPD sehingga tercapainya nilai evaluasi AKIP dengan baik. Perolehan capaian ini juga didukung beberapa kegiatan penilaian dan evaluasi oleh pemerintah daerah pada DPMPTSP yakni panji-panji keberhasilan di bidang pelayanan publik. Penilaian dan evaluasi oleh pemerintah pusat pada DPMPTSP antara lain Wilayah Birokrat Bersih



Melayani, Role Model, rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada DPMPTSP tahun 2022.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam menyusun rencana dan pelaksanaan anggaran Tahun 2022, DPMPTSP Kota Samarinda telah menggunakan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.14
PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBDP)
TAHUN 2022

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		Ket.	
			Fisik	Keuangan		
		Perubahan	(%)	(Rp)		(%)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda		23.350.760.182,00	100%	19.609.958.029,00	83,98%	Sub Unit
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Program
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.720.000,00	100%	32.258.000,00	98,59%	Sub Kegiatan
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.410.000,00	100%	35.126.000,00	99,20%	Sub Kegiatan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan
	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.301.410.949,00	100%	10.308.452.884,00	83,80%	Sub Kegiatan
	4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.237.127.000,00	100%	860.726.000,00	69,73%	Sub Kegiatan
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.686.000,00	100%	51.628.500,00	99,89%	Sub Kegiatan
	6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	873.000.000,00	100%	816.322.762,00	93,51%	Sub Kegiatan
	7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183.750.000,00	100%	183.357.400,00	99,79%	Sub Kegiatan



	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	311.250.000,00	100%	259.701.050,00	83,44%	Sub Kegiatan
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.600.000,00	100%	23.643.000,00	59,70%	Sub Kegiatan
	10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.972.000,00	100%	195.216.363,00	98,11%	Sub Kegiatan
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan
	11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.139.571.333,00	100%	408.406.550,00	35,84%	Sub Kegiatan
	12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	100%	74.334.000,00	92,92%	Sub Kegiatan
	13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.763.423.000,00	100%	1.670.541.054,00	94,73%	Sub Kegiatan
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan
	14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	288.480.300,00	100%	79.549.373,00	27,58%	Sub Kegiatan
	15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.707.300,00	100%	66.814.481,00	40,08%	Sub Kegiatan
	16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.390.000,00	100%	115.368.531,00	53,07%	Sub Kegiatan
	17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.810.779.400,00	100%	2.574.200.000,00	91,58%	Sub Kegiatan
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					Program
6.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					Kegiatan
	18. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	64.990.000,00	100%	59.245.550,00	91,16%	Sub Kegiatan
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					Program
7.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan
	19. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	65.145.000,00	100%	64.626.800,00	99,20%	Sub Kegiatan
	20. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	386.144.000,00	100%	332.957.600,00	86,23%	Sub Kegiatan
IV.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					Program



8.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Kegiatan
	21. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	172.992.900,00	100%	165.780.145,00	95,83%	Sub Kegiatan
V.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					Program
9.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan
	22. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	14.841.500,00	100%	14.491.500,00	97,64%	Sub Kegiatan
	23. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	272.450.500,00	100%	269.850.500,00	99,05%	Sub Kegiatan /DAK Non Fisik
	24. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	135.162.500,00	100%	109.182.500,00	80,78%	Sub Kegiatan /DAK Non Fisik
VI.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					Program
10.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan
	25. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	507.765.500,00	100%	496.238.850,00	97,73%	Sub Kegiatan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DPMPTSP pada tahun anggaran 2022 pada APBD murni mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 20.866.967.011,-** (Dua puluh milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan pada APBDP dilakukan penyesuaian anggaran sehingga DPMPTSP mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 23.350.760.182,-** (dua puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) .

Dari plafon anggaran, terserap sebesar **Rp. 19.609.958.029,-** (Sembilan belas milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah) atau 83,98 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jumlah program



dan kegiatan yang terealisasi dari anggaran tersebut yakni 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 24 (duapuluh empat) Sub Kegiatan. **Penyerapan anggaran pada tahun 2022 ini sudah sangat baik, karena telah tingginya realisasi fisik sebesar 100% daripada realisasi keuangan sebesar 83,98 % dan pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.**

3.5. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2022

Tabel 3.15
ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN (Pagu APBDP)
TAHUN 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD-P	Realisasi			Ket/ Efisiensi
			Fisik	Keuangan		
			(%)	(Rp)	(%)	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	23.350.760.182	100%	19.609.958.029	83,98 %	3.740.802.153
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.731.277.282	100%	18.097.584.584	83,28%	3.633.692.698
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.130.000	100%	67.384.000	98,91 %	746.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.720.000	100%	32.258.000	98,59 %	462.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.410.000	100%	35.126.000	99,20 %	284.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.538.537.949	100%	11.511.117.520	85,02%	2.027.420.429
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.301.410.949	100%	10.308.452.884	83,80%	1.992.958.065
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.237.127.000	100%	1.202.664.636	97,21%	34.462.364
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.658.258.000	100%	1.529.869.075	92,26%	128.388.925
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.686.000	100%	51.628.500	99,89%	57.500
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	873.000.000	100%	816.322.762	93,51%	56.677.238
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183.750.000	100%	183.357.400	99,79%	392.600
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	311.250.000	100%	259.701.050	83,44%	51.548.950
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.600.000	100%	23.643.000	59,70%	15.957.000
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.972.000	100%	195.216.363	98,11%	3.755.637
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.982.994.333	100%	2.153.281.604	72,19%	829.712.729
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.139.571.333	100%	408.406.550	35,84%	731.164.783
1.4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	100%	74.334.000	92,92%	5.666.000
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.763.423.000	100%	1.670.541.054	94,73%	92.881.946
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.483.357.000	100%	2.835.932.385	81,41%	647.424.615
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	288.480.300	100%	79.549.373	27,58 %	208.930.927
1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.707.300	100%	66.814.481	40,08 %	99.892.819
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.390.000	100%	115.368.531	53,07 %	102.021.469
1.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.810.779.400	100%	2.574.200.000	91,58 %	236.579.400
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	64.990.000	100%	59.245.550	91,16 %	5.744.450
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	64.990.000	100%	59.245.550	91,16 %	5.744.450



2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	64.990.000	100%	59.245.550	91,16 %	5.744.450
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	451.289.000	100%	397.584.400	88,10 %	53.704.600
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	451.289.000	100%	397.584.400	88,10 %	53.704.600
3.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	65.145.000	100%	64.626.800	99,20 %	518.200
3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	386.144.000	100%	332.957.600	86,23 %	53.186.400
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	172.992.900	100%	165.780.145	95,83 %	7.212.755
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	172.992.900	100%	165.780.145	95,83 %	7.212.755
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	172.992.900	100%	165.780.145	95,83 %	7.212.755
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	422.454.500,00	100%	393.524.500	93,15 %	28.930.000
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	422.454.500,00	100%	393.524.500	93,15 %	28.930.000
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	14.841.500	100%	14.491.500	97,64 %	350.000
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	272.450.500	100%	269.850.500	99,05 %	2.600.000
5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	135.162.500	100%	109.182.500	80,78 %	25.980.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	507.756.500	100%	496.238.850	97,73 %	11.517.650
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	507.756.500	100%	496.238.850	97,73 %	11.517.650
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	507.756.500	100%	496.238.850	97,73 %	11.517.650
TOTAL		23.350.760.182	100%	19.609.958.029	83,98 %	3.740.802.153

Dari pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda selama tahun 2022 guna mencapai Target Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat efisiensi terhadap pemakaian Dana Sebesar Rp. 3.740.802.153,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 16,02 % dari total anggaran tahun 2022.

Berikut disampaikan perbandingan Realisasi Anggaran dengan Efisiensi Tahun 2022 sebagai berikut :

Gambar 3.1.
DIAGRAM REALISASI ANGGARAN DENGAN EFISIENSI
TAHUN 2022



1.5. PRESTASI

Disamping capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan dibelakang, DPMPTSP Kota Samarinda juga telah meraih beberapa penghargaan, diantaranya adalah:

- a. Penilaian MCP Korsupgah Perizinan
- b. Penilaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM
- c. Juara 2 Stand Terbaik Pameran Kaltim Expo
- d. Juara 2 Penyusunan Laporan Keuangan
- e. Penilaian Percontohan Pelayanan Publik dari Kementerian Hukum dan HAM RI
- f. Penilaian AKIB-RB DPMPTSP Tahun 2021
- g. Penghargaan Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori "A" "Pelayanan Prima"
- h. Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Penyelenggaraan Ombudsman RI)
- i. Penilaian Bidang Pelayanan Publik (Panji-panji Keberhasilan PTSP dan Daya Saing Daerah)



IV. P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam kurun waktu Tahun 2022. LKjIP tersebut di dalamnya memuat evaluasi kinerja yang dalam tahapannya terdiri dari tahapan evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi pencapaian sasaran, kemudian membuat kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini penting dilakukan, karena dalam tahapan evaluasi kinerja tersebut adalah untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan adalah konsisten dengan proses dan ketetapan dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian akhir kinerja sasaran instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2022 mencapai bahkan melampaui 100% seperti tergambar pada table berikut dengan bebrapa indikator kinerja seperti berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pro-sentase	Tingkat Capaian Sasaran		
						B	C	K
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	nilai investasi	Rp.1.000.000.000,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN :Rp. 700.000.000.000,- PMA :Rp. 300.000.000.000,-	Rp. 1.737.419.619.798,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN :Rp. 1.270.879.500.000,- PMA :Rp. 466.540.119.798,-	173,74 %	√		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	89,69	99,65%	√		

Dari plafon anggaran, terserap sebesar **Rp. 19.609.958.029,-** (Sembilan belas milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah) atau 83,98 % dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp.23.350.760.182,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) . Jumlah program dan kegiatan yang terealisasi dari anggaran tersebut yakni 6 (enam) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan. Penyerapan anggaran pada tahun 2022 ini sudah sangat baik, karena telah tingginya realisasi fisik sebesar 100 % daripada realisasi



keuangan sebesar 83,98 % dan pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk capaian kinerja DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2022, secara umum menunjukkan hasil dengan katagori “BAIK” dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2022 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda terutama untuk Meningkatkan kinerja pemerintah Kota Samarinda.

4.2. SARAN-SARAN

Dari beberapa evaluasi diatas, didapat umpan balik (feedback) proses pembelajaran organisasi yang terus menerus (*building learning organisation*) melalui tim work yang harus diperhatikan dan mendapat dukungan semua pihak. Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

1. Terus mengembangkan prinsip-prinsip perbaikan proses pelayanan publik dengan inovasi rencanakan (*plan*) – kerjakan (*do*) – evauasi (*chek*) – inovasi perbaikan (*action*), sehingga terbentuknya Mal Pelayanan Publik yang berdaya saing kuat.
2. Bekerja berpedoman kepada peraturan perundang-undangan berlaku. Perbaikan atau review beberapa regulasi perlu dilakukan dalam rangka percepatan perizinan dan non perizinan, sehingga OSS dapat berjalan dengan lancar yang memberikan kemudahan pada pelaku usaha.
3. Mengembangkan sistem pelayanan publik yang mendorong investasi dengan lebih cepat terutama mempercepat proses perijinan dan memberikan solusi terhadap hambatan pelayanan;
4. Mengembangkan dan replikasi inovasi agar pelaksanaan pelayanan publik dapat lebih cepat dan efisien;
5. Mempercepat reformasi birokrasi pada sektor-sektor pilihan agar pencapaian tujuan dapat dipercepat sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran.



6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
7. Penyediaan sarana dan prasarana mendukung IT perizinan sesuai dengan perkembangan teknologi. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai.
8. Peningkatan fasilitas yang menunjang pelayanan dengan terus melakukan program kerja yang berpihak kepada masyarakat.
9. Melakukan kegiatan promosi melalui kegiatan-kegiatan pameran baik didalam kota maupun luar kota yang bisa meningkatkan nilai investasi.
10. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya instansi yang berorientasi kepada hasil serta instansi yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
11. Selalu memotivasi dan mengevaluasi kinerja seluruh pegawai/bidang untuk melaksanakan program kerja yang dimulai dengan perencanaan yang matang, agar hasilnya dapat lebih maksimal dan bermanfaat oleh masyarakat.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIKS PERENCANAAN STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN : 2021 - 2026

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	(4)	(5)	10	11
1	TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN	1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan PAD, berkurangnya angka pengangguran, berkembangnya sector riil diluar pertambangan, munculnya ekonomi kreatif, start up dan market place di era revolusi industry 4.0.	1. Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi	1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dengan menciptakan Iklim Investasi yang kondusif dan dapat menarik minat Investor	Memberikan kemudahan bidang Penanaman Modal dan Percepatan Berusaha;		Nilai Investasi		
								Nilai Pertumbuhan Investasi		
							PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realiasi Investasi (Rp)		
								Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
									- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
									- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
								Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		
									- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
									- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	
								PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
				- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal						
			- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin Terbit yang Efektif							
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							

NO		VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	(4)	(5)	10	11	
										<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 	
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah LKPM yang Masuk			
									Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
										<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 	
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pengguna Layanan Data			
									Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
										<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 	
	2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan	2.	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		
			2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang Profesional.		Memberikan Kepastian Hukum dan kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM			
									PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		
										<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 	

NO		VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	(4)	(5)	10	11	
											<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	
										<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 	
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
										<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 	
										Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
										<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi - Pengolahan Data Retribusi Daerah - Penetapan Wajib Retribusi Daerah - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 	
										ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	
										<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 	

NO		VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	(4)	(5)	10	11	
										ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
											- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
											- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
											- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
											- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
											- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
											- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
											- Penyediaan Bahan/Material
											- Fasilitas Kunjungan Tamu
											- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
											- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
										PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
											- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
											- Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
											- Pengadaan Mebel
											- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
											- Pengadaan Aset Tetap Lainnya
											- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
											- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
										PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
											- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
											- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
											- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO		VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	(4)	(5)	10	11	
										PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
										- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	
										- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
										- Pemeliharaan Mebel	
										- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
										- Pemeliharaan Aset tetap lainnya	
										- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
										- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
										- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

INDIKATOR KEGIATAN
12
Jumlah perda
Jumlah perda
Jumlah Perusahaan yang dievaluasi
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen
Jumlah Promosi yang diselenggarakan
Jumlah dokumen
Jumlah Kegiatan Promosi
Jumlah Izin Terbit

INDIKATOR KEGIATAN
12
Jumlah Masyarakat / Pelaku Usaha
Jumlah Pelaku Usaha
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
Jumlah ketetapan
Jumlah Laporan Pengendalian
Jumlah Perusahaan
Jumlah Perusahaan
Jumlah Perusahaan
Jumlah sistem Aplikasi
Jumlah Database yang diarsipkan
Nilai AKIP
Jumlah dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen RKA-SKPD

INDIKATOR KEGIATAN
12
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah DPA-SKPD
Jumlah Perubahan DPA-SKPD
Jumlah dokumen LAKIP
Jumlah laporan evaluasi
Jumlah Laporan
Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan
Gaji dan Tunjangan Non ASN yang di bayarkan
Jumlah Laporan
Jumlah Laporan
Jumlah Laporan
Jumlah Laporan
Jumlah Laporan
Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Jumlah Laporan
Jumlah Pegawai
Jumlah Sarana dan Prasarana
Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Jumlah Pegawai yang diikutsertakan bimtek/pelatihan
Jumlah Pegawai yang diikutsertakan bimtek

INDIKATOR KEGIATAN

12

Jumlah Laporan

Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan

Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Jumlah peralatan rumah tangga

Jumlah bahan logistik

Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan material yang disediakan

Jumlah Rombongan Tamu Yang Berkunjung

Jumlah SPPD

jumlah arsip dinamis

Laporan Rencana Kebutuhan Barang

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Mebel

Jumlah Peralatan dan Mesin

Jumlah Aset tetap Berwujud

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Laporan Penyediaan Jasa

Tagihan Rekening yang di bayarkan

Jumlah Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah tagihan Jasa Pelayanan Umum

INDIKATOR KEGIATAN
12
Laporan Pemeliharaan
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Pemeliharaan Mebel
Jumlah Pemeliharaan peralatan dan Mesin
Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Gedung Milik Sendiri/Sewa yang terpelihara
Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung yang terpelihara

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (perubahan)

TAHUN : 2022

INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1	SASARAN	Indikator Sasaran			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		3		4	5		6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	1 Nilai Pertumbuhan Investasi	milyar (Rp)	1	1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN	1, Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Input : Dana Output : Dokumen RUPM Outcome : Nilai Realisasi Investasi	Rp.	64.990.000	
					2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Input Dana Output : Jumlah Promosi Outcome : Jumlah Investor	Rp.	65.145.000	
							3. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Input Dana Output : Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota. Outcome : Nilai Investasi	Rp.	386.144.000	
					3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Input Dana Output : Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Rp.	172.992.900	5.100

1	SASARAN	Indikator Sasaran			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		3		4	5		6	7	8	9	10
								Outcome : Jumlah Izin terbit	Izin	3.550	
					4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Input Dana Output : Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal Outcome : Jumlah LKPM yang masuk	Rp Kegiatan usaha LKPM	14.841.500 30 300	
						6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Input : Dana Output : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal Outcome : Jumlah LKPM yang masuk	Rp. Pelaku Usaha LKPM	272.450.500 50 300	DAK Non Fisik	
						7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Input Dana Output : Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal Outcome : Jumlah LKPM yang masuk	Rp Kegiatan usaha LKPM	135.162.500 100 300	DAK Non Fisik	

1	SASARAN	Indikator Sasaran			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		3		4	5		7	8	9	10	
					5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	5. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Input : Dana Output : Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik yang dikaji, diolah dan dimanfaatkan Outcome : jumlah Sistem Informasi	Rp.	507.765.500	
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	nilai	89	6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : Dana Output : jumlah dokumen perencanaan Outcome : Nilai AKIP	Rp.	32.750.000	
							10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana Output : Dokumen Laporan Kinerja Outcome : Nilai AKIP	Rp.	35.410.000	
					7. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		11 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : Dana Output : Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	12.301.410.949	
							12 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Input : Dana	Rp.	1.237.127.000	

1	SASARAN	Indikator Sasaran			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		3		4	5		6	7	8	9	10
								Output : Gaji dan Tunjangan Non ASN yang di bayarkan Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Orang	48	
					8. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		Input : Dana Output : jenis komponen intalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	51.686.000	
						14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Input : Dana Output : Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	873.000.000	
						15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Input : Dana Output : jumlah bahan logistik Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	183.750.000	

1	SASARAN	Indikator Sasaran			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		3		4	5		6	7	8	9	10
						16 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana Output : laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. jenis laporan	311.250.000 15 10		
						17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana Output : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. jenis laporan	39.600.000 10 10		
						18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input Dana Output : Jumlah SPPD Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. SPPD laporan	198.972.000 150 10		
					9. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input Dana Output : Tagihan rekening yang dibayarkan Outcome : Laporan penyedia Jasa	Rp. laporan Laporan	1.139.571.333 36 3		
						20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input Dana Output :	Rp. 	80.000.000		

1	SASARAN	Indikator Sasaran			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		3		4	5		6	7	8	9	10
								Jumlah Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	10	
								Outcome : Laporan penyedia Jasa	Laporan	3	
							21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input Dana Output : Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum Outcome : Laporan penyedia Jasa	Rp.	1.763.423.000	3
					10. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Outcome : Laporan Pemeliharaan	Rp. unit Laporan	288.480.300 8 8	
							23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Input Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Outcome : Laporan Pemeliharaan	Rp. unit Laporan	166.707.300 7 8	
							24 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input Dana Output : Jumlah Pemeliharaan dan Mesin	Rp. Unit	217.390.000 60	

1	SASARAN	Indikator Sasaran			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		3		4	5		6	7	8	9	10
								Outcome : Laporan Pemeliharaan	Laporan	8	
						25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Input Dana	Rp.	2.810.779.400	
								Output : Jumlah gedung milik sendiri/sewa yang terpelihara	Gedung	1,00	
								Outcome : Laporan Pemeliharaan	Laporan	8	

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

LAMPIRAN II

TAHUN : 2021

INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1	2	Indikator Sasaran			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	1. Nilai Pertumbuhan Investasi	milyar (Rp)	1	1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN	1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Input : Dana Output : Dokumen RUPM Outcome : Nilai Realisasi Investasi	Rp.	64.990.000	59.245.550	91,16	
					2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Input Dana Output : Jumlah Promosi Outcome : Jumlah Investor	Rp.	65.145.000	64.626.800	99,20	
							3. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Input Dana Output : Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota. Outcome : Nilai Investasi	Rp.	386.144.000	332.957.600	86,23	
					3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Input Dana Output : Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Outcome : Jumlah Izin terbit	Rp.	172.992.900	165.780.145	95,83	

1	2	Indikator Sasaran			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
		URAIAN	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Input Dana Output : Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal Outcome : Jumlah LKPM yang masuk	Rp	14.841.500	14.491.500	97,64	
						6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman	Input : Dana Output : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal Outcome : Jumlah LKPM yang masuk	Rp.	272.450.500	269.850.500	99,05		
						7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Input Dana Output : Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal Outcome : Jumlah LKPM yang masuk	Rp	135.162.500	109.182.500			
					5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	5. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Input : Dana Output : Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik yang dikaji, diolah dan dimanfaatkan Outcome :	Rp.	507.765.500	496.238.850	97,73	

1	2	Indikator Sasaran			6	7	SUB KEGIATAN						14
		3	4	5			8	9	10	11	12	13	
	SASARAN	URAIAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KET
								jumlah Sistem Informasi	Aplikasi	3			
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	nilai	89	6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : Dana Output : jumlah dokumen perencanaan Outcome : Nilai AKIP	Rp. Dokumen Nilai	32.750.000 5 81	32.258.000	98,50	
							10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana Output : Dokumen Laporan Kinerja Outcome : Nilai AKIP	Rp. Dokumen Nilai	35.410.000 1 81	35.126.000	99,20	
						7. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : Dana Output : Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. Orang Laporan	12.301.410.949 73 7	10.308.452.884	83,80	
							12. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Input : Dana Output : Gaji dan Tunjangan Non ASN yang di bayarkan Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. Orang Laporan	1.237.127.000 48 7	860.726.000	69,57	
						8. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana Output : jenis komponen intalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan Outcome :	Rp. Jenis	51.686.000 3	51.628.500	99,89	

1	2	Indikator Sasaran			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					14	
		URAIAN	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI		PERSENTASE
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
							Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	10				
						14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. Jenis Laporan	873.000.000 15 10	816.322.762	93,51		
						15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : Dana Output : jumlah bahan logistik Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. jenis Laporan	183.750.000 15 10	183.357.400	99,79		
						16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana Output : laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. jenis Laporan	311.250.000 15 10	259.701.050	83,44		
						17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana Output : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. jenis Laporan	39.600.000 10 10	23.643.000	59,70		
						18. Penyelenggaraan Rapat	Input :						

1	2	Indikator Sasaran			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					KET	
		URAIAN	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI		PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana	Rp.	198.972.000	195.216.363	98,11	
								Output : Jumlah SPPD	SPPD	150			
								Outcome : Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	10			
						9. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input Dana	Rp.	1.139.571.333	408.406.550	35,84	
								Output : Taghihan rekening yang dibayarkan	Laporan	36			
								Outcome : Laporan penyedia Jasa	Laporan	3			
							20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input Dana	Rp.	80.000.000	74.334.000	92,92	
								Output : Jumlah Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporabn	10			
								Outcome : Laporan penyedia Jasa	Laporan	3			
							21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input Dana	Rp.	1.763.423.000	1.670.541.054	94,73	
								Output : Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum					
								Outcome : Laporan penyedia Jasa	Laporan	3			
						10. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input Dana	Rp.	288.480.300	79.549.373	27,58	
								Output : Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	unit	8			
								Outcome : Laporan Pemeliharaan	Laporan	8			
							23. Penyediaan Jasa	Input					

1	SASARAN	Indikator Sasaran			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
		URAIAN	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Outcome : Laporan Pemeliharaan	Rp. unit Laporan	166.707.300 7 8	66.814.481	40,08	
						24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input Dana Output : Jumlah Pemeliharaan dan Mesin Outcome : Laporan Pemeliharaan	Rp. Unit Laporan	217.390.000 60 8	115.368.531	53,07	
						25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input Dana Output : Jumlah gedung milik sendiri/sewa yang terpelihara Outcome : Laporan Pemeliharaan	Rp. Gedung Laporan	2.810.779.400 1 8	2.574.200.000	91,58	

FORM EVALUASI

BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA OPD TAHUN 2022

INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

1	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							KET
				URAIAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET 2022	REALISASI 2021	REALISASI 2022	PERSENTASE =(10)/(8)*100%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN	1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	-	64.990.000	-	59.245.550,00	91,16	
		2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Rp.	128.280.000	65.145.000	118.564.500	64.626.800	99,20	
				3. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	620.750.000	386.144.000	590.097.711	332.957.600	86,23	
		3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Rp.	449.860.000	172.992.900	408.808.361	165.780.145	95,83	
		4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	266.836.000	14.841.500	215.240.574	14.491.500	97,64	
				6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	267.445.000	272.450.500	214.254.000	269.850.500	99,05	
				7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	99.600.000	135.162.500	20.395.500	109.182.500	80,78	

1	2	3	4	SUB KEGIATAN						11	12
				5	6	7	8	9	10		
SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET 2022	REALISASI 2021	REALISASI 2022	PERSENTASE =(10)/(8)*100%	KET	
		5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	5. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp.	480.175.000	507.765.500	444.939.525	496.238.850	97,73	
		6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA	9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	-	32.750.000	-	32.258.000	98,50	
				10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	100.000.000	35.410.000	99.555.000	35.126.000	99,20	
		7. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	12.037.563.000	12.301.410.949	10.081.252.741	10.308.452.884	83,80	
				12. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	1.768.965.000	1.237.127.000	1.561.291.610	860.726.000	69,57	
		8. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	8. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	39.084.250	51.686.000	38.982.500	51.628.500	99,89	
				14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	59.987.000	873.000.000	57.708.750	816.322.762	93,51	
				15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	189.997.525	183.750.000	189.923.650	183.357.400	99,79	
				16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	293.324.400	311.250.000	280.502.250	259.701.050	83,44	
				17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	199.908.000	39.600.000	191.166.234	23.643.000	59,70	

1	2	3	4	SUB KEGIATAN							11	12
				5	6	7	8	9	10	PERSENTASE =(10)/(8)*100%		
SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET 2022	REALISASI 2021	REALISASI 2022			KET	
			18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	199.908.000	198.972.000	191.166.234	195.216.363	98,11			
		9. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	1.035.600.000	1.139.571.333	184.392.468	408.406.550	35,84			
			20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	30.000.000	80.000.000	0	74.334.000	92,92			
			21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	180.000.000	1.763.423.000	178.222.000	1.670.541.054	94,73			
		10. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	261.859.040	288.480.300	149.637.875	79.549.373	27,58			
			23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Rp.	1.036.545.000	166.707.300	1.026.204.000	66.814.481	40,08			
			24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	1.036.545.000	217.390.000	1.026.204.000	115.368.531	53,07			
			25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	22.160.000	2.810.779.400	7.765.000	2.574.200.000	91,58			

